



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 23 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Minim Perhatian, Seniman Mengadu ke DPRD

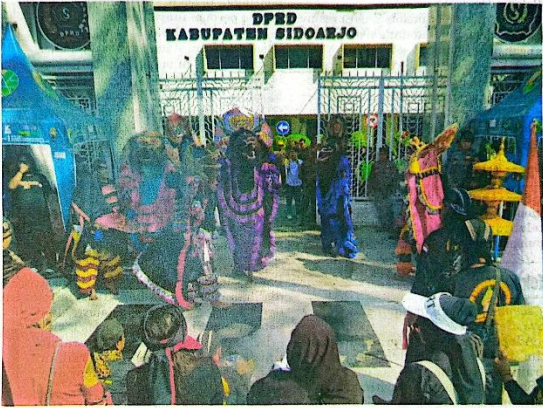
KOTA-Sejumlah seniman Kota Delta menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sidoarjo, Selasa (22/7). Mereka menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku seni dan budaya di Sidoarjo.

Koordinator Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa, Bambang, mengungkapkan bahwa Sidoarjo hingga saat ini belum memiliki gedung kesenian yang memadai. Bahkan, mereka merasa terganggu jika dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Mojokerto dan Pasuruan.

"Jalan sudah seperti tempat untuk berkreasi bagi kami, karena kami tidak memiliki gedung kesenian yang layak," ungkapnya.

Selain masalah fasilitas, para seniman juga mengeluhkan sulitnya mengurus legalitas kelompok seni. Banyak komunitas kesenian rakyat yang belum memiliki nomor induk resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud).

Mereka juga menuntut adanya jaminan sosial berupa BPJS bagi pelaku se-



TAMPIL DULU: Sambal membawa alat kesenian, para seniman datang ke kantor DPRD Sidoarjo.

ni. Pasalnya, tak sedikit seniman yang kesulitan saat sakit karena tidak memiliki perlindungan kesehatan.

"Kami juga meminta agar kesenian Sidoarjo diprioritaskan dalam agenda pemerintah da-

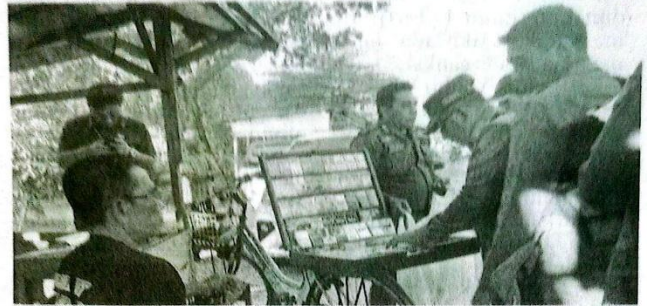
erah. Jangan sampai ada kelompok kesenian yang terpaksa menjual alat kesenian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup," tambah Bambang.

Lebih lanjut, mereka meminta dibentuk lembaga adat khusus untuk

kebudayaan, seperti Wali Adat Jengolo, yang dapat menampung suara pelaku seni dan menjaga kelestarian situs budaya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo,

● Ke Halaman 10



Petugas Satpol PP memeriksa rokok ilegal.

Rokok Ilegal Rambah 18 Kecamatan di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo ada jadwal turun ke lapangan, untuk melakukan operasi penyitaan rokok ilegal yang dijual belikan kepada masyarakat. Ini dikarenakan, peredaran rokok ilegal, sudah merambah di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anas Ali Akbar SSTP, mengatakan dulu rokok ilegal banyak dijual pada wilayah kecamatan yang terbelang padat penduduknya. Misalnya seperti Kecamatan Krian, Taman, Waru, Sedati, Gedangan, Sukodono, Buduran dan Sidoarjo.

Namun seiring waktu, peredaran rokok ilegal, saat ini juga mulai banyak dijual pada wilayah Kecamatan yang tidak termasuk padat penduduk. Misalnya Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon, Krembung, Porong, Candi, Tanggulangin dan Jabon. "Saat ini banyak orang coba-coba mengonsumsi rokok ilegal, karena dengan harga yang hanya cuma Rp15 ribu, aromanya dianggap sama dengan rokok yang harganya Rp25 ribu," ujar Anas, Selasa (22/7) kemarin.

Dengan harga yang murah, saat ini menurut Anas, banyak anak-anak kecil yang juga mulai belajar merokok. Status sosial mereka merata, mulai dari anak keluarga miskin maupun kaya. Pihak Satpol PP, menurut Anas, hanya bisa melakukan edukasi agar masyarakat tidak membeli rokok ilegal dan melakukan penyitaan rokok ilegal saja. "Tidak bisa melakukan penindakan kepada para penjual rokok ilegal. Karena bukan menjadi kewenangan kami," ujarnya.

Sehingga terkadang, ada kejadian beberapa waktu dagangan rokok ilegal disita oleh petugas Satpol PP Sidoarjo, beberapa bulan kemudian mereka ketahuan berjualan lagi di tempat lain. "Kami hanya bisa menyita produk rokok ilegal saja, juklaknanya hanya seperti itu," komentar Anas. Dari hasil operasi rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sidoarjo selama ini, kata Anas, pada akhir tahun 2025 ini, akan dilakukan pemusnahan yang akan dilakukan oleh pihak Bea Cukai. [kus.ca]

Dukung Koperasi Merah Putih, Cegah Jeratan Pinjol dan Rentenir

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberadaan koperasi serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurutnya, keberadaan KDKMP di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup merata, dengan total 346 koperasi yang terbentuk hingga saat ini. Ia berharap koperasi tersebut dapat benar-benar menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi warga, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Koperasi ini harus menjadi solusi bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat, dan diharapkan mampu menghapus ketergantungan terhadap pinjol dan rentenir," ujar Mimik saat mengikuti Zoom Meeting peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden RI, Senin sore (22/7/25).

Wabup menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring rutin terhadap koperasi yang sudah terbentuk, agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa



Wakil Bupati Mimik Idayana bersama Forkopimda menghadiri Zoom Meeting peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI.

selalu mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi.

"Setelah dibentuk, mari kita bersama-sama turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan mengetahui kebutuhan serta kesulitan

yang dihadapi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Penny Apridawati, mengingatkan seluruh pengurus koperasi agar mematuhi Undang-undang Perkoperasian dan

aktif menyusun laporan keuangan secara berkala.

"Saya minta agar para pengurus koperasi melaporkan kondisi keuangan secara berkala demi keberlangsungan koperasi. KDKMP ini diharapkan menjadi ujung tombak

perekonomian desa," tegas Penny. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Edi Kurniadi, menyampaikan bahwa koperasi tersebut telah difasilitasi NPWP dan tabungan BRI tanpa setoran awal. Ke depan, Dinas akan memfasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pelatihan untuk pengurus dan pengawas koperasi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan para pengurus dan akan memfasilitasi NIB dan pelatihan. Kami juga bekerja sama dengan Delta Artha untuk mendukung KURDA agar UMKM Sidoarjo makin tumbuh," jelasnya.

Dukungan terhadap program KDKMP juga datang dari Pimpinan Cabang BRI Sidoarjo, Sudono. Senin sore, ia menyampaikan bahwa BRI akan mendukung koperasi melalui layanan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

"KDKMP dapat memanfaatkan AgenBRILink untuk transaksi keuangan seperti setor-tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan hingga cicilan. Kami juga menyediakan fasilitas KUR mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta tanpa agensi," terang Sudono. ●Loe

Seniman Tradisional Geruduk DPRD, Tuntut Pembangunan Gedung Kesenian

SIDOARJO - Puluhan seniman tradisional yang tergabung dalam Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB) mendatangi DPRD Sidoarjo dan Pendopo Delta Wibawa kemarin (22/7). Mereka ingin pemerintah membangun gedung kesenian yang representatif di Kota Delta.

"Sidoarjo tertinggal dibanding Mojokerto dan Pasuruan dalam hal fasilitas kesenian," ujar koordinator aksi Bambang.

Dalam tuntutanannya, seniman juga mengeluhkan sulitnya mengurus legalitas komunitas kesenian yang belum diakui resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disbud). Permintaan lain yang menuntut adalah soal jaminan sosial. Bambang berharap ada skema BPJS yang bisa diakses para pelaku seni. Sebab, tak sedikit yang kesulitan saat sakit. Bahkan, ada kelompok kesenian yang sampai menjual alat demi

memenuhi kebutuhan hidup. "Kami ingin suara seniman lebih didengar, dan tidak terpinggirkan di daerah sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyatakan siap menghubungkan aspirasi itu ke dinas terkait. "Pengurusan legalitas bisa difasilitasi, sedangkan untuk BPJS, kami bantu rekomendasinya melalui Dinas," jelasnya. (ezza/uzi)

BAKAR DUPA: Massa aksi dari Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB) menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sidoarjo kemarin (22/7). Mereka ingin pengurusan legalitas komunitas kesenian dipermudah.



AMIRU REZA/UMMAPOS

Pasca Launching Koperasi Merah Putih Wabup Sidoarjo: Hindari Pinjol dan Rentenir

Sidoarjo, Memorandum
Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung keberadaan koperasi, serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Di Sidoarjo, sudah terbentuk 346 KDKMP. Artinya sudah menyeluruh, sehingga diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Koperasi ini harus menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi warga, kebutuhan rumah tangga warga, bahkan diharapkan mampu menghapus pinjaman online (pinjol) dan rentenir," ujar Mimik.

Ia menambahkan, setelah resmi dibentuk KDKMP ini, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, agar tujuan koperasi yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

"Setelah dibentuk, mari bersama-sama rutin melaku-

kan evaluasi dan monitoring dengan turun ke bawah agar tau kebutuhan dan kesulitan apa yang dihadapi," tambah-

nya. Sekdadak Penny Apridawati juga mengingatkan agar seluruh pengurus koperasi senantiasa mematuhi Undang-undang Perkoperasian serta membuat laporan secara berkala untuk keberlangsungan KDKMP.

"Saya minta kepada pengurus koperasi agar melaporkan keuangan secara berkala, untuk keberlangsungan koperasi masing-masing. Sebab, koperasi ini diharapkan menjadi



Wakil Bupati Mimik Idayana bersama Forkopimda menghadiri Zoom Meeting peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI.

ujung tombak perekonomian desa/kelurahan lebih mandiri," tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Edi Kurniadi, mengatakan saat ini

KDKMP ini sudah mendapatkan fasilitas NPWP dan Tabungan BRI tanpa setoran awal. Ke depan, Dinkopum akan memfasilitasi nomor induk berusaha (NIB) dan pelatihan untuk pengurus dan pengawas KDKMP.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas, nantinya kami akan memfasilitasi NIB dan pelatihan, serta kami sudah berkoordinasi dengan Delta Artha untuk mendukung kredit usaha rakyat daerah (KURDA) agar iklim UMKM," ujarnya.

Sebelumnya, ketika menghadiri Zoom Meeting launch-

ing 80.000 KDKMP bersama wabup, Kepala Cabang BRI Sidoarjo, Sudono mengatakan, pihaknya mendukung penuh program itu melalui AgenBRILink yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, KDKMP dapat menjalankan berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan.

"Selain itu, dukungan kami di antaranya adanya fasilitas KUR mulai dari Rp100 juta (untuk pelaku mikro) hingga Rp500 juta (untuk ritel) tanpa agensi," jelasnya. (kris/san/epse)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BAKAR DUPA: Massa aksi dari Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB) menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Sidoarjo kemarin (22/7). Mereka ingin pengurusan legalitas komunitas kesenian dipermudah.

Seniman Tradisional Geruduk DPRD, Tuntut Pembangunan Gedung Kesenian

SIDOARJO -Puluhan seniman tradisional yang tergabung dalam Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB) mendatangi DPRD Sidoarjo dan Pendopo Delta Wibawa kemarin (22/7). Mereka ingin pemerintah membangun gedung kesenian yang representatif di Kota Delta.

"Sidoarjo tertinggal dibanding Mojokerto dan Pasuruan dalam hal fasilitas kesenian," ujar koordinator aksi Bambang.

Dalam tuntutan, seniman juga mengeluhkan sulitnya pengurusan legalitas komunitas kesenian yang belum diakui resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Permintaan lain yang menuntut adalah soal jaminan sosial. Bambang berharap ada skema BPJS yang bisa diakses para pelaku seni. Sebab, tak sedikit yang kesulitan saat sakit. Bahkan, ada kelompok kesenian yang sampai menjual alat demi

memenuhi kebutuhan hidup. "Kami ingin suara seniman lebih didengar, dan tidak terpinggirkan di daerah sendiri," imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyatakan siap menghubungkan aspirasi itu ke dinas terkait. "Pengurusan legalitas bisa difasilitasi, sedangkan untuk BPJS, kami bantu rekomendasinya melalui Dinsos," jelasnya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Minim Perhatian, Seniman Mengadu ke DPRD

KOTA-Sejumlah seniman Kota Delta menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sidoarjo, Selasa (22/7). Mereka menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku seni dan budaya di Sidoarjo.

Koordinator Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa, Bambang, mengungkapkan bahwa Sidoarjo hingga saat ini belum memiliki gedung kesenian yang memadai. Bahkan, mereka merasa tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Mojokerto dan Pasuruan.

“Jalanan sudah seperti tempat untuk berkreasi bagi kami, karena kami tidak memiliki gedung kesenian yang layak,” ungkapnya.

Selain masalah fasilitas, para seniman juga mengeluhkan sulitnya mengurus legalitas kelompok seni. Banyak komunitas kesenian rakyat yang belum memiliki nomor induk resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud).

Mereka juga menuntut adanya jaminan sosial berupa BPJS bagi pelaku se-



M. SAIFUL ROHMAN / RADAR SIDOARJO

TAMPIL DULU: Sambil membawa alat kesenian, para seniman datang ke kantor DPRD Sidoarjo.

ni. Pasalnya, tak sedikit seniman yang kesulitan saat sakit karena tidak memiliki perlindungan kesehatan.

“Kami juga meminta agar kesenian Sidoarjo diprioritaskan dalam agenda pemerintah dae-

rah. Jangan sampai ada kelompok kesenian yang terpaksa menjual alat kesenian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup,” tambah Bambang.

Lebih lanjut, mereka meminta dibentuk lembaga adat khusus untuk

kebudayaan, seperti Wali Adat Jenggolo, yang dapat menampung suara pelaku seni dan menjaga kelestarian situs budaya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo,

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berpolemik, PT MTB Masih Pasarkan Tanah Kavling

SIDOARJO - Di tengah polemik penipuan jual beli tanah kavling, PT MTB diduga masih memasarkan tanah kavlingnya di Sedati. Padahal sudah banyak korbannya.

"Dari status WhatsApp-nya masih dipasarkan," keluh salah satu korban, Fatimatuzzahroh. Dia ingin aparat segera bertindak agar tidak semakin banyak korban.

Fatimah bercerita, dia awalnya percaya karena Direktur PT MTB Kurniawan Yuda sempat bilang bahwa dia adalah kader dan pengurus Golkar Sidoarjo. Ketua DPD



Kalau memang terbukti, silakan kader saya ditindak secara hukum, kami tidak menghalang-halangi."

ADAM RUSDY

Ketua DPD Golkar Sidoarjo

Golkar Sidoarjo Adam Rusdy mengungkapkan, Kurniawan Yuda adalah kader dan pengurus aktif DPD Partai Golkar Sidoarjo sebagai salah satu Wakil Ketua.

"Benar, yang bersangkutan



adalah kader dan pengurus aktif. Tidak ada kaitannya dengan partai," katanya.

Adam mempersilakan jika aparat penegak hukum menindak kadernya. "Kalau memang terbukti, silakan kader saya ditindak secara hukum," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT MTB Kurniawan Yuda mengatakan menghentikan sementara penjualan karena ramai kasus. "Kami juga berusaha membangun kepercayaan lagi sambil berjalan menyelesaikan masalah," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



alikusyanto/bhirawa

Petugas Satpol PP merazia rokok ilegal.

Rokok Ilegal Rambah 18 Kecamatan di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo ada jadwal turun ke lapangan, untuk melakukan operasi penyitaan rokok ilegal yang dijual belikan kepada masyarakat. Ini dikarenakan, peredaran rokok ilegal, sudah merambah di 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anas Ali Akbar SSTP, mengatakan dulu rokok ilegal banyak dijumpai pada wilayah kecamatan yang terbilang padat penduduknya. Misalnya seperti Kecamatan Krian, Taman, Waru, Sedati, Gedangan, Sukodono, Buduran dan Sidoarjo.

Namun seiring waktu, peredaran rokok ilegal, saat ini juga mulai banyak dijumpai pada wilayah Kecamatan yang tidak termasuk padat penduduk. Misalnya Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Prambon, Krembung, Porong, Candi, Tanggulangin dan Jabon. "Saat ini banyak orang coba-coba mengkonsumsi rokok ilegal, karena dengan harga yang hanya cuma Rp15 ribu, aromanya dianggap sama dengan rokok yang harganya Rp25 ribu," ujar Anas, Selasa (22/7) kemarin.

Dengan harga yang murah, saat ini menurut Anas, banyak anak-anak kecil yang juga mulai belajar merokok. Status sosial mereka merata, mulai dari anak keluarga miskin maupun kaya. Pihak Satpol PP, menurut Anas, hanya bisa melakukan edukasi agar masyarakat tidak membeli rokok ilegal dan melakukan penyitaan rokok ilegal saja. "Tidak bisa melakukan penindakan kepada para penjual rokok ilegal. Karena bukan menjadi kewenangan kami," ujarnya.

Sehingga terkadang, ada kejadian beberapa waktu dagangan rokok ilegal disita oleh petugas Satpol PP Sidoarjo, beberapa bulan kemudian mereka ketahuan berjualan lagi di tempat lain. "Kami hanya bisa menyita produk rokok ilegal saja, Juklaknya hanya seperti itu," komentar Anas. Dari hasil operasi rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sidoarjo selama ini, kata Anas, pada akhir tahun 2025 ini, akan dilakukan pemusnahan yang akan dilakukan oleh pihak Bea Cukai. [kus.ca]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoarjo Ajak Warga

Dukung Koperasi Merah Putih, Cegah Jeratan Pinjol dan Rentenir

SIDOARJO - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberadaan koperasi serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurutnya, keberadaan KDKMP di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup merata, dengan total 346 koperasi yang terbentuk hingga saat ini. Ia berharap koperasi tersebut dapat benar-benar menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi warga, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Koperasi ini harus menjadi solusi bagi kebutuhan rumah tangga masyarakat, dan diharapkan mampu menghapus ketergantungan terhadap pinjol dan rentenir," ujar Mimik saat mengikuti Zoom Meeting peluncuran kelembagaan 80.000 KDKMP oleh Presiden RI, Senin sore (21/7/25).

Wabup menegaskan pentingnya evaluasi dan monitoring rutin terhadap koperasi yang sudah terbentuk, agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa



Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana usai zoom meeting,ajak dukung koperasi Merah Putih

sekaligus mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi.

"Setelah dibentuk, mari kita bersama-sama turun ke lapangan untuk mengevaluasi dan mengetahui kebutuhan serta kesulitan

yang dihadapi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengingatkan seluruh pengurus koperasi agar mematuhi Undang-undang Perkoperasian dan

aktif menyusun laporan keuangan secara berkala.

"Saya minta agar para pengurus koperasi melaporkan kondisi keuangan secara berkala demi keberlangsungan koperasi. KDKMP ini diharapkan menjadi ujung tombak

perekonomian desa," tegas Fenny.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Edi Kurniadi, menyampaikan bahwa koperasi-koperasi tersebut telah difasilitasi NPWP dan tabungan BRI tanpa setoran awal. Ke depan, Dinas akan memfasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pelatihan untuk pengurus dan pengawas koperasi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan para pengurus dan akan memfasilitasi NIB dan pelatihan. Kami juga bekerja sama dengan Delta Artha untuk mendukung KURDA agar UMKM Sidoarjo makin tumbuh," jelasnya.

Dukungan terhadap program KDKMP juga datang dari Pimpinan Cabang BRI Sidoarjo, Sudono. Senin sore, Ia menyampaikan bahwa BRI akan mendukung koperasi melalui layanan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

"KDKMP dapat memanfaatkan AgenBRILink untuk transaksi keuangan seperti setor-tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan hingga cicilan. Kami juga menyediakan fasilitas KUR mulai dari Rp100 juta hingga Rp500 juta tanpa agunan," terang Sudono. ●Loe

DATA



IST

JAGA LINGKUNGAN: Tim Satgas Pengairan bersihkan sungai di Kecamatan Taman.

Tekan Banjir, Pemkab Bentuk Satgas Pengairan

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengairan sebagai upaya konkret menekan risiko banjir dan menjaga fungsi saluran air.

Satgas ini bertugas membersihkan sungai dari sampah serta tumbuhan liar yang menghambat aliran air. Selain

untuk mencegah banjir, pembentukan Satgas juga bertujuan menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kota Delta.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa Satgas Pengairan disebar ke empat wilayah strategis: barat, timur, utara, dan selatan. "Setiap wilayah kami tempatkan tiga tim yang bisa dikerahkan

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIBANGUN TOTAL: Kondisi Pasar Krian pasca kebakaran tahun lalu. Pasar tersebut akan dibangun dengan konsep modern pada 2026.

Pasar Krian Akan Dibangun dengan Konsep Modern pada 2026

Revitalisasi Pasar Krian dipastikan belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Meski anggaran telah disiapkan pada tahun 2025, pelaksanaan fisik pembangunan diperkirakan baru bisa dimulai pada 2026.

M Saiful Rohman, Hartawan Radar Sidoarjo

KEPALA Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Sul-ton Hasan, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan proyek belum bisa dijalankan. Salah satunya adalah rekomendasi dari DPRD Sidoarjo agar pasar dibangun secara total, bukan sekadar renovasi.

“Memang sudah dianggarkan pada tahun 2025, tapi ada beberapa faktor yang membuat pembangunannya kemungkinan

mundur ke 2026. Salah satunya adalah permintaan dari dewan agar pasar dibangun total, bukan hanya direnovasi,” ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (22/7).

Sulton menjelaskan bahwa pihaknya ingin menghadirkan pasar yang lebih modern dan representatif. Bahkan, dalam rencana desain awal, pasar akan dilengkapi fasilitas seperti eskalator.

“Kami ingin Pasar Krian dibangun dengan konsep modern. Apalagi dari sisi penataan kawasan sudah mendukung. Ditambah lagi, keberadaan RSUD Sidoarjo Barat di dekat lokasi menjadi nilai tambah,” terangnya.

Saat ini, kajian teknis masih terus dilakukan, termasuk perhitungan anggaran untuk pembangunan secara menyeluruh. Belum ada angka pasti terkait total biaya yang dibutuhkan.

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Minim Perhatian,...

Bangun Winarso, menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia mengatakan bahwa beberapa permintaan bisa segera dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Untuk pengurusan nomor induk, pihaknya akan menghubungkan langsung dengan Dispendikbud.

Sementara itu, untuk masalah BPJS, pihaknya akan membantu melalui rekomendasi Dinas Sosial, asalkan memenuhi persyaratan yang ada.

“Kami menerima aspirasi dari teman-teman seniman dan akan berusaha membantu sebaik mungkin,” ujarnya.

Bangun juga setuju agar kesenian lokal mendapat perhatian lebih dalam

program pemerintah kabupaten. Ia mendukung usulan agar agenda kesenian lebih bervariasi dan lebih banyak melibatkan pelaku seni dari Sidoarjo.

“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini, khususnya terkait legalitas dan jaminan sosial bagi pelaku seni. Jangan sampai kesenian tradisional di Sidoarjo justru punah karena kurangnya perhatian,” tegasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasar Krian Akan...

Sementara itu, para pedagang yang menjadi korban kebakaran tahun lalu telah direlokasi ke tempat penampungan sementara. Mereka tidak lagi

berjualan dari rumah masing-masing.

“Para pedagang sudah kami tempatkan di lokasi penampungan sementara. Sebagian berada di dalam area pasar, sebagian lainnya di luar,” pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tekan Banjir,...

sesuai kebutuhan lapangan,” ujarnya, Selasa (22/7).

Adapun komposisi tim terdiri dari: tim satgas sungai, delapan satgas drainase dan empat satgas irigasi.

Satgas bekerja secara rutin menyisir saluran air setiap hari untuk membersihkan lumpur, tanaman liar, dan sampah. Fokus utama adalah mengatasi pendangkalan sungai serta penyumbatan yang banyak disebabkan oleh sampah dan eceng gondok.

“Jika satu wilayah, misalnya Sidoarjo

Barat, sudah tertangani, maka tim bisa dialihkan ke daerah lain. Tujuannya agar distribusi air tetap lancar dan potensi banjir bisa ditekan,” jelas Dwi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai dan saluran air.

Menurutnya, partisipasi warga sangat penting dalam menjaga kelestarian sistem pengairan.

“Kami mengajak warga untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ini demi kebaikan bersama,” tegasnya. (sai/vga)





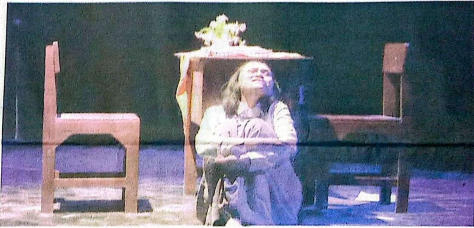
INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Seniman Sidoarjo Lestarkan Warisan Teater Melalui Parade

SIDOARJO - Dewan Kesenian Sidoarjo ingin membangkitkan kecintaan terhadap seni teater melalui sisi historis. Upaya itu direalisasikan dengan mengelat Parade Teater Sidoarjo ke-2. Parade Teater Sidoarjo bertujuan mengangkat spirit Teater Dardanella. Mereka adalah kelompok teater lokal asli Sidoarjo yang hadir sejak seabad lalu. Untuk itulah, acara itu mengusung tema *Dardanella: A Legacy of Theatre*. Gelaran Parade Teater Sidoarjo ke-2 berlangsung tiga hari pada 18-20 Juli. Acara pembuka dimulai dengan diskusi *Dardanella: Legacy of Theatre*. Kemudian berlanjut ke pementasan kesenian rakyat. Pagelaran puncak pada Minggu (20/7) lalu menampilkan 14 kelompok teater pelajar di Dekesda Art Centre. Mereka merupakan pelajar dari jenjang SMP hingga SMA.

POTRET REMAJA: Kelompok teater pelajar Embrio Art Community menampilkan monolog dengan lakon BK (Bimbingan Konseling) pada puncak Parade Teater Sidoarjo ke-2, Minggu (20/7) lalu.



HADYAN HANIDANAY/JAWA POS

Ketua Panitia Parade Teater Sidoarjo Jefry Dio

Firmansyah mengatakan, parade itu ditujukan untuk

mengenalkan kiprah historis seni Teater Dardanella



JEFRY DIO FIRMANSYAH, ketua panitia Parade Teater Sidoarjo

Kami ingin mengenalkan warisan kebudayaan bahwa Teater Dardanella cikal bakal identitas teater di Sidoarjo."

ke generasi muda. "Menyasar generasi muda memang menjadi misi kami," ungkap Jefry pada Minggu (20/7) lalu. Salah satu penampilan mencolok disajikan Embrio

Art Community. Mereka menampilkan monolog dengan lakon BK (Bimbingan Konseling). Pentas itu menceritakan tumpukan persoalan remaja dengan latar belakang *broken home*. **(had/kkn)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasca Launching Koperasi Merah Putih

Wabup Sidoarjo: Hindari Pinjol dan Rentenir

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung keberadaan koperasi, serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Di Sidoarjo, sudah terbentuk 346 KDKMP. Artinya sudah menyeluruh, sehingga diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Koperasi ini harus menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi warga, kebutuhan rumah tangga warga, bahkan diharapkan mampu menghapus pinjaman *online* (pinjol) dan rentenir,” ujar Mimik.

Ia menambahkan, setelah resmi dibentuk KDKMP ini, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, agar tujuan koperasi yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai. “Setelah dibentuk, mari bersama sama rutin melaku-

kan evaluasi dan monitoring dengan turun kebawah agar tau kebutuhan dan kesulitan apa yang dihadapi,” tambahnya.

Sekdakab Fenny Apridawati juga mengingatkan agar seluruh pengurus koperasi senantiasa mematuhi Undang-undang Perkoperasian serta membuat laporan secara berkala untuk keberlangsungan KDKMP.

“Saya minta kepada pengurus koperasi agar melaporkan keuangannya secara berkala, untuk keberlangsungan koperasi masing-masing. Sebab, koperasi ini diharapkan menjadi



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana bersama forkopimda menghadiri Zoom meeting peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI.

ujung tombak perekonomian desa/kelurahan lebih mandiri,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkopum) Edi Kurniadi, mengatakan saat ini

KDKMP ini sudah mendapatkan fasilitas NPWP dan Tabungan BRI tanpa setoran awal. Ke depan, Dinkopum akan memfasilitasi nomor induk berusaha (NIB) dan pelatihan untuk pengurus dan pengawas KDKMP.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas, nantinya kami akan fasilitasi NIB dan pelatihan, serta kami sudah berkoordinasi dengan Delta Artha untuk dukungan kredit usaha rakyat daerah (Kurda) agar iklim UMKM,” ujarnya.

Sebelumnya, ketika menghadiri Zoom Meeting launch-

ing 80.000 KDKMP bersama wabup, Kecapa Cabang BRI Sidoarjo, Sudono mengatakan, pihaknya mendukung penuh program itu melalui Agen-BRILink yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pada layanan tersebut, KDKMP dapat menjalankan berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, *top-up*, pembayaran tagihan, hingga cicilan.

“Selain itu, dukungan kami di antaranya adanya fasilitas KUR mulai dari Rp 100 juta (untuk pelaku mikro) hingga Rp 500 juta (untuk ritel) tanpa agunan,” jelasnya. (kri/san/epe)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo Dukung Peningkatan SDM Kepala Sekolah dan Guru SD



Radar-today | Sidoarjo – Sekitar 200 orang lebih guru SD dan kepala sekolah SD se Kecamatan Tulangan ditingkatkan SDM nya. Mereka mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (22/7). Sehari penuh, para guru dan kepala sekolah SD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus 01-04 Kecamatan Tulangan itu mendapatkan materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Materi disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Slamet Riyadin.



Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirta Adi itu dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori. Tirta Adi sendiri hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia sampaikan Bupati Sidoarjo sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Sidoarjo.

“Kegiatan PKB ini mengambil tema “Optimalisasi Deep Learning dalam membangun karakter peserta didik”,ujarnya.

Tirta Adi mengatakan bahwa implementasi deep learning merupakan salah satu dari 12 program strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Saat ini peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan kepada guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan SDM nya.

“Prinsip dari deep learning itu adalah pembelajaran itu harus memberikan makna, pembelajaran itu harus memberikan kesan mendalam, setelah anak-anak belajar dari bapak ibu itu ada bekas, itulah yang disebut meaningful learning,”ujarnya kepada ratusan guru dan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Tulangan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dikatakannya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya SDM guru harus terus ditingkatkan.

“SDM guru harus menjadi fokus bersama karena tantangan kedepannya luar biasa,”ucapnya.

Dhamroni mengatakan guru saat ini dihadapkan pada tantangan digitalisasi dalam pembelajaran. Penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan saat ini terus meningkat. Dibeberapa sekolah bahkan sudah menerapkannya. Untuk itu guru harus dapat mengikutinya.

“Oleh karena itu bapak ibu guru jangan pernah takut karena usia untuk pegang gadget dan menjadi males untuk belajar, itu jangan,”pintanya.
(rin)



Pemkab Sidoarjo dan DPRD Dukung Peningkatan SDM 200 Guru



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Pemkab Sidoarjo dan DPRD dukung peningkatan SDM 200 guru . 200 orang lebih guru SD dan kepala sekolah SD se Kecamatan Tulangan ditingkatkan SDM nya. Pagi tadi, mereka mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, (22/7). Sehari penuh, para guru dan kepala sekolah SD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah/KKKS dan Kelompok Kerja Guru/KKG di Gugus 01-04 Kecamatan Tulangan itu mendapatkan materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Materi disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Slamet Riyadin.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi itu dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori. Tirto Adi sendiri hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia sampaikan Bupati Sidoarjo sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Sidoarjo.

“Kegiatan PKB ini mengambil tema “Optimalisasi Deep Learning dalam membangun karakter peserta didik”,ujarnya.

Pemkab Sidoarjo dan DPRD dukung peningkatan SDM 200 guru. Tirta Adi mengatakan bahwa implementasi deep learning merupakan salah satu dari 12 program strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Saat ini peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan kepada guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan SDM nya.

“Prinsip dari deep learning itu adalah pembelajaran itu harus memberikan makna, pembelajaran itu harus memberikan kesan mendalam, setelah anak-anak belajar dari bapak ibu itu ada bekas, itulah yang disebut meaningful learning,”ujarnya kepada ratusan guru dan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Tulangan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dikatakannya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya SDM guru harus terus ditingkatkan.

“SDM guru harus menjadi fokus bersama karena tantangan kedepannya luar biasa,”ucapnya.

Dhamroni mengatakan guru saat ini dihadapkan pada tantangan digitalisasi dalam pembelajaran. Penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan saat ini terus meningkat. Dibeberapa sekolah bahkan sudah menerapkannya. Untuk itu guru harus dapat mengikutinya.

“Oleh karena itu bapak ibu guru jangan pernah takut karena usia untuk pegang gadget dan menjadi males untuk belajar, itu jangan,”pintanya.



“Akselerasi Budaya” Gema Aspirasi Leluhur, DPRD Sidoarjo Terima Tuntutan Budayawan



Ratusan budayawan, seniman, spiritualis, dan pegiat budaya berjalan dari Museum Mpu Tantular dihalaman Gedung DPRD Sidoarjo

Filesatu.co.id, SIDOARJO | SUASANA sakral menyelimuti aksi budaya bertajuk “Akselerasi Budaya” (Aksi Selaras dan Aspirasi Budaya) yang digelar Selasa Kliwon, 22 Juli 2025. Ratusan budayawan, seniman, spiritualis, dan pegiat budaya berjalan dari Museum Mpu Tantular menuju Gedung DPRD Sidoarjo untuk menyuarakan aspirasi pelestarian seni dan warisan budaya lokal.

Di depan gedung dewan, orasi budaya berpadu dengan pertunjukan bantengan, pecutan, pembacaan puisi, serta pembakaran dupa dan kemenyan sebagai penghormatan kepada leluhur. Suasana khidmat tersebut menjadi wujud keprihatinan sekaligus harapan terhadap masa depan kebudayaan Sidoarjo.



Koordinator aksi, Bambang Purwanto, menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti pembangunan gedung kesenian, kemudahan legalitas kelompok seni, perlindungan sosial (BPJS), hingga perhatian terhadap situs dan praktik spiritual tradisional.

Dua anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman dan Bangun Winarso, turun langsung menyambut massa aksi. Mereka berdialog secara terbuka dan menyatakan bahwa Pemkab pernah membangun dua gedung kesenian, namun keduanya kini dialihfungsikan –satu menjadi Gedung Wanita, satunya lagi menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP).

Untuk Nomor Induk Kesenian, disarankan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait BPJS, Bangun menjelaskan bahwa warga Sidoarjo bisa mengakses BPJS Kesehatan gratis untuk kelas 3, sementara BPJS Ketenagakerjaan diurus melalui pemberi kerja.

Terkait penjaga situs budaya, Bangun menyebut Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya sebagai dasar hukum pemberdayaan kuncen dan juru pelihara situs.

Aksi Para budayawan berharap ini menjadi awal perubahan nyata demi masa depan kebudayaan Sidoarjo yang lebih kuat dan berakar.***



Ritual dan Orasi, Aksi Budaya Warnai Gedung DPRD Sidoarjo



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Ritual dan orasi, aksi budaya warnai gedung DPRD Sidoarjo. Seruan pelestarian budaya lokal menggema di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (22/7/2025). Ratusan budayawan, seniman, spiritualis, dan pegiat budaya yang mengatasnamakan Barisan Pejuang Kebudayaan Bangsa (BPKB), menggelar aksi damai bertajuk Akselerasi Budaya (Aksi Selaras Aspirasi Budaya), Titik kumpul Museum Mpu Tantular menuju kantor DPRD Sidoarjo.

Mereka membawa pesan kuat: pemerintah harus lebih serius melindungi warisan budaya leluhur.

Aksi penuh nuansa tradisi ini diwarnai pertunjukan bantengan, pecutan, puisi, hingga pembakaran dupa dan kemenyan. Doa-doa untuk keselamatan bumi Jenggolo juga dikumandangkan, menciptakan suasana khidmat sekaligus sakral.

Koordinator aksi, Bambang Purwanto, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat. Mulai pembangunan gedung kesenian, kemudahan administrasi kelompok seni, jaminan sosial seperti BPJS, perlindungan situs budaya dan punden, hingga dukungan terhadap pengobatan alternatif berbasis budaya.

Ritual dan orasi, aksi budaya warnai gedung DPRD Sidoarjo. DPRD Sidoarjo pun merespons cepat. Dua anggota Komisi D, H. Usman dan Bangun Winarso, turun langsung menyambut peserta aksi. Tanpa jarak, mereka duduk lesehan bersama para budayawan, menyimak dan menanggapi satu per satu aspirasi yang disuarakan.

“Pemkab sebenarnya sudah dua kali bangun gedung kesenian, tapi dua-duanya dialih fungsikan. Satu jadi Gedung Wanita, kini Hotel Sinar Mayang, satunya lagi jadi Mal Pelayanan Publik,” ungkap Bangun Winarso.

Ia menyebut hal itu sebagai ironi di tengah makin mendesaknya kebutuhan ruang berekspresi bagi seniman lokal.

Soal Nomor Induk Kesenian (NIK), para budayawan disarankan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk jaminan sosial, Bangun menjelaskan warga bisa mengakses BPJS Kesehatan gratis dengan KTP Sidoarjo, khusus kelas 3. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan dilakukan melalui pemberi kerja.

Terkait penjaga situs dan punden, Bangun mengungkapkan bahwa Sidoarjo sudah punya Perda No. 4 Tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo, tentang Pelestarian Cagar Budaya. Regulasi itu bisa jadi dasar hukum pemberian anggaran untuk para kuncen dan juru pelihara situs.

Meski berlangsung damai, aksi ini bukan sekadar seremoni. Ia membawa pesan serius: budaya bukan aksesori pembangunan, melainkan jantung identitas daerah. Para pelaku budaya berharap, dialog ini menjadi awal perubahan nyata, bukan sekadar wacana.

“Budaya adalah warisan hidup. Jangan hanya dikenang, tapi dijaga dan diwariskan,” tegas Bambang.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo Dukung Peningkatan SDM Kepala Sekolah dan Guru SD



SIDOARJO, SOROTMATA.COM 1 200 orang lebih guru SD dan kepala sekolah SD se Kecamatan Tulangan ditingkatkan SDM nya. Pagi tadi, mereka mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, (22/7/2025). Sehari penuh, para guru dan kepala sekolah SD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah/KKKS dan Kelompok Kerja Guru/KKG di Gugus 01-04 Kecamatan Tulangan itu mendapatkan materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Materi disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Slamet Riyadin.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirta Adi itu dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori. Tirta Adi sendiri hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia sampaikan Bupati Sidoarjo sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Sidoarjo.

“Kegiatan PKB ini mengambil tema “Optimalisasi Deep Learning dalam membangun karakter peserta didik”,ujarnya.

Tirta Adi mengatakan bahwa implementasi deep learning merupakan salah satu dari 12 program strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Saat ini peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan kepada guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan SDM nya.

“Prinsip dari deep learning itu adalah pembelajaran itu harus memberikan makna, pembelajaran itu harus memberikan kesan mendalam, setelah anak-anak belajar dari bapak ibu itu ada bekas, itulah yang disebut meaningful learning,”ujarnya kepada ratusan guru dan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Tulangan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dikatakannya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya SDM guru harus terus ditingkatkan.

“SDM guru harus menjadi fokus bersama karena tantangan kedepannya luar biasa,”ucapnya.

Dhamroni mengatakan guru saat ini dihadapkan pada tantangan digitalisasi dalam pembelajaran. Penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan saat ini terus meningkat. Dibeberapa sekolah bahkan sudah menerapkannya. Untuk itu guru harus dapat mengikutinya.

“Oleh karena itu bapak ibu guru jangan pernah takut karena usia untuk pegang gadget dan menjadi males untuk belajar, itu jangan,”pintanya. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo Dukung Peningkatan SDM Kepala Sekolah dan Guru SD



Sidoarjo, centralberitanews.com 200 orang lebih guru SD dan kepala sekolah SD se Kecamatan Tulangan ditingkatkan SDM nya. Pagi tadi, mereka mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan/PKB di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, (22/7). Sehari penuh, para guru dan kepala sekolah SD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah/KKKS dan Kelompok Kerja Guru/KKG di Gugus 01-04 Kecamatan Tulangan itu mendapatkan materi deep learning atau pembelajaran mendalam. Materi disampaikan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Slamet Riyadin.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirta Adi itu dihadiri Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori. Tirta Adi sendiri hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ia sampaikan Bupati Sidoarjo sangat mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Sidoarjo.

“Kegiatan PKB ini mengambil tema “Optimalisasi Deep Learning dalam membangun karakter peserta didik”,ujarnya.



Tirto Adi mengatakan bahwa implementasi deep learning merupakan salah satu dari 12 program strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Saat ini peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan kepada guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan SDM nya.

“Prinsip dari deep learning itu adalah pembelajaran itu harus memberikan makna, pembelajaran itu harus memberikan kesan mendalam, setelah anak-anak belajar dari bapak ibu itu ada bekas, itulah yang disebut meaningful learning,”ujarnya kepada ratusan guru dan kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Tulangan.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dikatakannya mutu dan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkat. Oleh karenanya SDM guru harus terus ditingkatkan.

Advertisement

“SDM guru harus menjadi fokus bersama karena tantangan kedepannya luar biasa,”ucapnya.

Dhamroni mengatakan guru saat ini dihadapkan pada tantangan digitalisasi dalam pembelajaran. Penggunaan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan saat ini terus meningkat. Dibeberapa sekolah bahkan sudah menerapkannya. Untuk itu guru harus dapat mengikutinya.

“Oleh karena itu bapak ibu guru jangan pernah takut karena usia untuk pegang gadget dan menjadi males untuk belajar, itu jangan,”pintanya. (Git)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tiada Duanya, Budayawan Sidoarjo Geruduk DPRD dan Pendopo, Tuntut Kebijakan Adil



Aksi Akselerasi Budaya Sidoarjo menuntut gedung kesenian, pelestarian punden, hingga legalitas EO. Sekda: aspirasi ditampung, kami terbuka. Foto: Istimewa

Sidoarjo, Ruang.co.id – Suasana Gedung DPRD dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo berubah menjadi panggung peradaban, Selasa (22/7/2025).

Ketika ratusan pelaku budaya menggelar aksi damai bertajuk "Akselerasi Budaya Sidoarjo". Ruwatan simbolik digelar, membakar kemenyan dan doa-doa dilangitkan, menolak roh jahat politik dan ketidakadilan budaya di Sidoarjo.

Di DPRD Sidoarjo, hampir 100 budayawan dengan berbagai atributnya, ditemui oleh Bangun Sekretaris, dan Usman anggota Komisi D. Kehadiran Budayawan yang menuntut keadilan ini, diterima yang nantinya akan dibahas di Komisinya.



Usai berorasi di DPRD, massa long march menuju Pendopo. Mereka membawa puluhan tuntutan, untuk menghidupkan kembali denyut budaya lokal yang dianggap mati suri.

Aksi ini disambut terbuka oleh Sekda Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, yang hadir bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Tirto Adi, dan Kabid Kebudayaan, Kartini, M.Pd.

Sebelum berlangsungnya dialog, para budayawan ini dari halaman luar melakukan kegiatan ritual, dengan sarana kemenyan dan garam, sebagai sesajen pengusir roh jahat yang ada di pusaran Pendopo Delta Wibawa.

"Ritual ini kita lakukan bersama – sama dengan tujuan positif, untuk mengusir roh – roh jahat yang menyelimuti pusaran Pendopo," ujar Ki Sapto ahli pengobatan hipnoterapi.

"Kami meyakini, suasana suhu politik yang belakangan terjadi, dan kejadian – kejadian yang di luar nalar manusia terutama di pusaran pendopo, karena roh – roh jahat masih bergentayangan mengganggu ketenteraman Sidoarjo," ungkapnya yang juga sekretaris salah satu komunitas budaya di Sidoarjo.

Dalam forum dialog terbuka bersama perwakilan budayawan, Sekda Fenny mengaku memahami keresahan para budayawan.

"Kami sangat menghargai semangat teman-teman pelaku budaya. Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, namun tentu semua harus sesuai regulasi dan alur formal," ujarnya.

Menyoal tuntutan Gedung Kesenian, Sekda menjelaskan bahwa rencana itu pernah diajukan, namun terganjal alih fungsi lahan menjadi Gedung Wanita dan Mal Pelayanan Publik.

Di sisi lain, tentang Nomor Induk Kelompok Kesenian, Sekda menyebut bisa diurus via OSS, namun pernyataan ini langsung diklarifikasi Tirto Kadisdikbud yang mengakui selama ini prosesnya bersifat manual.

"Prosesnya belum online. Hingga saat ini, kami tetap memprosesnya secara manual di dinas, karena belum masuk dalam sistem OSS," tegas Tirto yang disambut baik para budayawan.

Si forum itu pula, perwakilan budayawan juga mempersoalkan penggunaan Event Organizer (EO) dalam program budaya daerah, yang dinilai sarat dugaan penyimpangan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sejumlah EO disebut tak jelas legalitasnya dan diduga difasilitasi oknum tertentu. Menanggapi itu, Kartini menepis tuduhan tersebut.

"Kami tidak berani sembarangan. Semua kegiatan menggunakan APBD harus melalui prosedur yang ketat dan akuntabel. Bila ada dugaan, mohon dilampiri bukti dan sampaikan lewat mekanisme yang resmi," ujar Kartini.

Sorotan lain datang dari Ketua DPC PWDPI Sidoarjo, Agus Subakti, ST, yang turut hadir dan memberi pernyataan keras.

"Kami akan dalam semua hal yang disuarakan. Pers melalui penyampaian berita, sekaligus sebagai pengawal kebenaran sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat," tandas Agus.

Aksi ini tak hanya bicara gedung atau agenda seremonial. Di tempat – tempat sarana vital pemerintahan dan dewan ini, mereka menuntut haknya sebagai berikut: hak yang sama adilnya sosial-budaya, dari pemetaan situs makam leluhur, penghargaan seniman, hingga pengakuan legal bagi praktisi spiritual dan pengobatan alternatif.

Kini, semua mata tertuju pada langkah lanjutan Pemkab. Apakah pertemuan ini hanya menjadi angin lalu, atau benar-benar membuka jalan menuju kebijakan kebudayaan yang berkeadilan?

Dari Pendopo Jenggolo, suara para pewaris budaya telah menggema. Saatnya pemerintah menjawabnya bukan dengan janji, tapi tindakan konkret.

Aksi damai ini bagi para budayawan ini sebagai wujud ruwatan sejarah, menghapus kelam, membuka lembar baru kebudayaan Sidoarjo yang lebih beradab dan bermartabat.

